

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Survei Pada SKPD se-Kabupaten Bintan)**

**Oleh :
Firmansyah Dwi Putra
Pembimbing : Rita Anugrah and Supriono**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : ratnasariputri25@gmail.com

*The Effect of Human Resources Capacity, Utilization of Information Technology
and Internal Control System on The Reliability of District
Financial Government Report
(Survey of Bintan District)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of human resource capacity, utilization of information technology and internal accounting control on the reliability of district financial government report of Bintan District. The data in this study used the primary data obtained from distributing questionnaires to head and accounting/ financial administration staff of Bintan district which amounted to 60 institution. This study used multiple regression analysis method using SPSS version 20 The results of this study indicate that human resource capacity, utilization of information technology, and internal accounting control have a positive effect on the reliability of local government financial reporting in Bintan Regency. With significance value for human resource capacity variable is 0,000, variable utilization of information technology equal to 0,014 and internal accounting control variable 0.000.

Keywords : Reliability, Human Resource Capacity, Utilization of Information Technology and Internal Accounting Control System

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas

kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Indriasari dan Nahartayo 2008). *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)

antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Suatu informasi dikatakan relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan juga dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang lain yaitu dapat dipahami, memiliki pengertian bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai bahkan keliru. Hal ini dapat kita lihat pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan, (WTP DPP) atas LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2013. (Sumber <http://www.dppkdkabbintan.org>)

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu (1) Belanja hibah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah TA 2013 tidak sesuai ketentuan; (2) belanja bantuan sosial tidak sesuai kriteria tujuan pemberian bantuan; (3) pembayaran utang jangka pendek lainnya direalisasikan pada belanja barang dan jasa dan belanja modal; (4) pengelolaan persediaan obat pada RSUD dan gudang farmasi dinas kesehatan tidak memadai / kurang tertib; (5) penatausahaan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) pada kuasa BUD belum memadai; (6) persiapan pemerintah Kabupaten Bintan menuju penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu (1) Penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bintan TA 2013 pada PT Bank Riau Kepri belum didukung bukti kepemilikan; (2) Pengelolaan Penerimaan Retribusi perijinan tertentu pada BPMPD belum sesuai ketentuan dan keterlambatan pembayaran retribusi IMB belum dikenakan sanksi administrasi minimal sebesar Rp13.840.763,58, (3) Pekerjaan belanja modal pada dinas pekerjaan umum mengalami kelebihan perhitungan volume addendum, komponen kelebihan pembayaran

material yang tidak diperlukan sebesar Rp320.688.867,84, denda keterlambatan sebesar Rp19.946.872,47, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp14.971.510,83 pada dinas perhubungan; (4) Pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Bintan belum memadai (5) Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) puskesmas Teluk Sebong dan PPK-BLUD dana bergulir belum memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan. Mengingat bahwa keandalan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Bintan.

Hal yang juga mungkin dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah Teknologi Informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik.

Kemudian yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang

disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi 2007).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan berbeda, serta masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan memotivasi saya untuk menganalisis ulang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartayo (2008) yang meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah. Alasan mereplikasi penelitian Indriasari dan Nahartayo adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang pernah dilakukan dahulu dengan penelitian saat ini. Penelitian ini akan menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sampel yang digunakan saat ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Bintan, sedangkan penelitian sebelumnya pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.

Peneliti menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (KSDM), Pemanfaatan Teknologi Informatika (PTI) dan Pengendalian Intern Akuntansi pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah daerah se-Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan.

Dari uraian latar belakang, maka masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?, 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

TELAAH PUSTAKA

Pengaruh Sumber Daya manusia (SDM) terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perubahan membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004) Dinata (2004), Imelda (2005).

Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya job description, dan kurangnya dilaksanakannya pelatihanpelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah kota Palembang. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari system akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005) dalam Desi dan Ertambang (2008).

Pengaruh Teknologi Informasi (TI) Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008). Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing. Pemanfaatan

teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD. Penelitian Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan struktural dan aparat yang memiliki peran dalam

penyusunan anggaran pada setiap SKPD di pemerintah Kabupaten Bintan yang tersebar di 23 SKPD. Untuk menentukan sampel penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel yang diambil dari setiap SKPD di Kabupaten Bintan sebanyak minimal 3 orang atau lebih responden sehingga semuanya ada 69 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner.

Analisis Data

1. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Suatu instrumen valid dan reliabel apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Husein, 2003:89). Dalam hal ini, pernyataan yang memiliki koefisien korelasi yang lebih kecil dari 0,5 berarti tidak lolos uji validitas dan pernyataan ini harus dibuang.

b. Uji Realibilitas

Untuk menguji realibilitas dipergunakan uji Alpha Cronbach yang dianggap paling sesuai untuk pengujian. Realibilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dilakukan analisis grafik atau dengan melihat

normal probability plot. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Gozali, 2009;68).

3. Uji Asumsil Klasik

Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi.

a) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance untuk tiap-tiap variabel independen. Jika nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,10 berarti terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2009;69).

b) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan dilihat melalui pola diagram pencar (Scatterplot).

4. Pengujian Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda. Hipotesis yang dikemukakan diuji dengan persamaan berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Keandalan laporan keuangan

a = Konstanta

b_1 - b_3 = Koefisien regresi

e = Standar error

X_1 = Kapasitas SDM

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Partisipasi Masyarakat

X_4 = Pengendalian internal akuntansi

5. Pengujian Hipotesis

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat.

a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau probabilitas $< \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel bebas mampu menjelaskan bersama-sama variabel terikat atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian dan Analisis Data

1. Analisis Data dan Statistik

Analisis data dilakukan terhadap 60 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data, rata-rata jawaban responden untuk variabel keandalan pelaporan keuangan adalah 27,9333, diperoleh

standar deviasi 2,93931. Variabel Sumber daya manusia dengan nilai rata-rata jawaban responden 39,6000, diperoleh standar deviasi 3,76063. Variabel Teknologi informasi dengan nilai rata-rata jawaban responden 32,3167, diperoleh standar deviasi 3,77095. Variabel Pengendalian intern akuntansi dengan nilai rata-rata jawaban responden 36,9167, diperoleh standar deviasi 4,60026.

2. Hasil Uji Validitas Data

Kriteria yang digunakan dalam menentukan valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat $\alpha = 0,05$, $df = n-2$ ($60-2$) = 58 $r_{\text{tabel}} = 0,2144$. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil uji validitas untuk instrumen sumber daya manusia (sdm), teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan keandalan pelaporan keuangan dinyatakan valid dan dapat melakukan pengujian selanjutnya.

3. Hasil Uji Reliabilitas Data

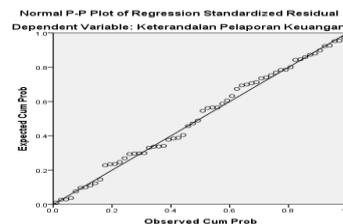
Untuk pengujian reliabilitas penulis akan melihat dari nilai *cronbach alpha*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Hasil uji reliabilitas terhadap 4 instrumen penelitian menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data penelitian ini dapat dilihat dari *normal probability plot*. *Normal probability plot* pada penelitian ini terlihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan (2016)

Dari grafik di atas terlihat bahwa data tersebut disekitar garis lurus tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data adalah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dari ketiga variabel independen tersebut semua nilai *tolerance* berada di atas atau $> 0,10$ dan nilai *VIF* dibawah atau < 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

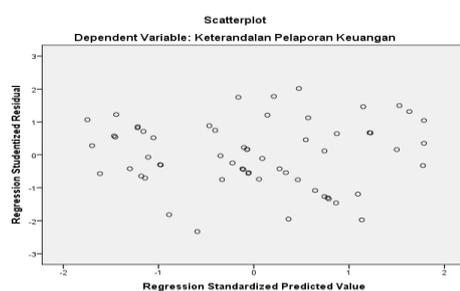
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson (DW)*. Hasil pengujian nilai Durbin-Watson yaitu 1,966. Yang mana nilai tersebut berada diantara antara -2 sampai

dengan +2 yang berarti tidak ada autokorelasi

d. Uji Heteroskedastisitas

Pemeriksaan terhadap gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola pencar (*scatter plot*). Gambar 2 di bawah ini merupakan gambar hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : *Data Olahan (2016)*

Diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

1. Hasil Pengujian Model Regresi

Pengujian model regresi dapat ditentukan sebagai berikut :

$$Y = 0,990 + 0,294X_1 + 0,169X_2 + 0,267X_3 + e$$

Keterangan:

2. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

a. Hasil Pengujian Hipotesis Satu (X_1)

Hasil perhitungan menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,282 > 2,003$ dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Yang mana t_{tabel} 2,002 diperoleh

dari ($n - k - 1 = 60 - 3 - 1 = 56$) dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Kondisi ini didukung oleh jumlah sumber daya manusia di Bagian Keuangan yang memadai dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang berlatar belakang akuntansi. Selain ini pegawai juga memiliki pedoman tentang prosedur kerja dan prosedur akuntansi sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing individu cukup jelas.

Hasil hipotesis ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Namun hasil hipotesis ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartayo (2008), Faristina Rosalin (2011) dan Dita Afriani (2011) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.

b. Hasil Pengujian Hipotesis Dua (X_2)

Hasil pengujian terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,534 > 2,003$ dengan nilai signifikan sebesar 0.014 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Yang mana t_{tabel} 2,003 diperoleh dari ($n - k - 1 = 60 - 3 - 1 = 56$) dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Hasil pengujian diatas memberikan kesimpulan yaitu agar dapat terlaksananya pengelolaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai. Karena, teknologi informasi tersebut baik secara *hardware* maupun *software*, akan dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartayo (2008), Andriani (2010), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Faristina Rosalin (2011) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.

c. Hasil Pengujian Hipotesis Tiga (X_3)

Hasil pengujian terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,505 > 2,003$ dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Yang mana t_{tabel} 2,003 diperoleh dari $(n - k - 1 = 60 - 3 - 1 = 46)$ dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa Pengendalian intern akuntansi

berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartayo (2008), Faristina Rosalin (2011) dan Dita Afriani (2011) menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah Berdasarkan proses pengolahan data yang dilakukan maka di peroleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,869 ^a	0,755	0,742

Sumber : Data Olahan (2016)

Hasil perhitungan pada Tabel 1 di atas, diperoleh *adjusted R²* sebesar 0,755. Dengan demikian variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi hanya dapat menjelaskan variabel keterandalan pelaporan keuangan sebesar 75,55%. Sedangkan sisanya 24,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel selain yang di teliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,282 > 2,003$ dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan alpha sebesar 0.05, maka keputusannya adalah

- Ha diterima dan Ho ditolak artinya kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan daerah.
2. Nilai pemanfaatan teknologi adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,534 > 2,003$ dengan nilai signifikan sebesar 0.014 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.
 3. Nilai untuk pengendalian intern akuntansi adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,505 > 2,003$ dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa kabupaten bahkan se-Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal dalam memperoleh data kuisisioner. Misalnya mencari waktu yang tepat bagi responden untuk mengisi kuisisioner, memberikan pemahaman kepada responden yang kurang paham terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan, serta diharapkan peneliti juga dapat menyebarkan kuisisioner secara langsung pada setiap SKPD. Sehingga, tingkat pengembalian kuisisioner lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung.
3. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuisisioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden. Sesuai dengan metode pengumpulan data kuisisioner yang digunakan, di mana penyebarannya dilakukan secara langsung.
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (pemda). Misalnya variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan variabel Ketepatanwaktuan. Ketepatanwaktuan (timeliness) adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Dalam hal tertentu, ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/ presisi (*accuracy/ precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling

mengorbankan (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material.

5. Meskipun dalam konteks yang kecil namun hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (KSDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan. Berhasilnya atau berpengaruhnya semua hipotesis yang disusun bisa menjadi rujukan dan masukan bagi SKPD kabupaten Bintan untuk mengevaluasi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pada setiap SKPD, pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengendalian intern akuntansi yang baik dan memadai. Sehingga, dengan mengevaluasi serta memberikan peningkatan yang baik terhadap faktor-faktor tersebut, maka diharapkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan akan mengalami peningkatan yang semakin baik serta dapat meningkatkan dan mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. **Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik.** *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Andriani Wiwik, 2010. **Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah..** *Skripsi*. Politeknik Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM dengan SPSS 19.** Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. **Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,** *Jurnal.SNA XI*. Pontianak.
- Mahmudi. 2007. **Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Ekonomi, Sosial, dan Politik.
UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Mardiasmo. 2006. **Perwujudan
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntansi Sektor Publik:
Suatu Sarana Good
Governance.** *Jurnal Akuntansi
Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-
17.

Rosalin, Faristina 2011. **Faktor-
faktor yang Mempengaruhi**

**Keandalan pelaporan
Keuangan Badan Layanan
Umum.** *Skripsi*, Universitas
Diponegoro

Winidyaningrum dan Rahmawati,
2010. **Pengaruh Kapasitas
Sumberdaya Manusia
Terhadap Ketepatan dan
Keterandalan Pelaporan
Keuangan.** *Jurnal SNA XIII.*
Purwokerto.